



SALINAN

BUPATI SINJAI

-6-

BUPATI SINJAI

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR 49 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI  
TAHUN 2013 - 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2013 – 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



BUPATI SINJAI

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 tahun 2009 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
10. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 – 2018.



## BUPATI SINJAI

- 3 -

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Sinjai.
2. Bupati adalah Bupati Sinjai.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
6. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
7. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD.
8. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi Organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
9. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

### BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

#### Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup IKU terdiri dari:
  - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
  - b. IKU SKPD.



BUPATI SINJAI

- 4 -

- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Setiap SKPD wajib menyusun IKU SKPD.
- (2) IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB III  
KEGUNAAAN

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk:

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB IV  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Tahun 2013 – 2018.
- (2) Penetapan IKU SKPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis SKPD Tahun 2013 – 2018.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. IKU Pemerintah Daerah paling kurang memuat indikator hasil (outcome); dan
  - b. IKU SKPD paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
  - a. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
  - b. Kebutuhan data statistik pemerintah; dan
  - c. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.



BUPATI SINJAI

- 5 -

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 30 Desember 2013

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

H. TAIYEB A. MAPPASERE

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 NOMOR 49



BUPATI SINJAI

-6-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI

NOMOR 49 TAHUN 2013

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013-2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 - 2018

No.	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Satuan	SKPD Penanggungjawab	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	
1	Meningkatnya produksi hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan	1	Produktifitas Padi	ton/ha	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		2	Produktifitas Jagung	ton/ha	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		3	Produktifitas Hortikultura :			
		a.	Buah-buahan	ton/ha	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		b.	Sayuran	ton/ha	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura



BUPATI SINJAI

- 7 -

		c. Biofarmaka	ton/ha	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura
		4 Produktifitas Kayu Rimba Campuran	ton/ha	Dinas Perkebunan Dan Kehutanan	Dinas Perkebunan Dan Kehutanan
		5 Produktifitas Getah Pinus	kubik/ha	Dinas Perkebunan Dan Kehutanan	Dinas Perkebunan Dan Kehutanan
		6 Produktifitas Perikanan Tangkap	ton/tahun	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		7 Produktifitas Perikanan Budidaya	ton/tahun	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		8 Persentase peningkatan populasi Sapi Potong	ekor/tahun	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
		9 Persentase Peningkatan populasi Ayam Kampung (AKUSI)	ekor/tahun	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
2	Meningkatnya efektifitas Kelembagaan Pangan	10 Jumlah Cadangan Pangan pemerintah Dan Masyarakat Yang Tersedia	ton	Badan ketahanan Pangan Dan penyuluhan Pertanian	Badan ketahanan Pangan Dan penyuluhan Pertanian
		11 Persentase Capaian Pola Pangan Haraan berdasarkan norma PPH Nasional	%	Badan ketahanan Pangan Dan penyuluhan Pertanian	Badan ketahanan Pangan Dan penyuluhan Pertanian



BUPATI SINJAI

- 8 -

3	Meningkatnya produktifitas dan daya saing usaha perdagangan, industri rumah tangga, koperasi dan UMKM	12	Jumlah IRT produktif	unit	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		13	Jumlah Usaha Perdagangan produktif	unit	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		14	Jumlah UMKM produktif	buah	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
		15	Jumlah koperasi aktif	buah	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
		16	jumlah izin usaha yang diterbitkan (, izin prinsip penanaman modal dalam negeri, izin usaha penanaman dalam negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dll)	buah/lbr	Badan penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan	Badan penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan
4	Meningkatnya kunjungan wisata	17	Jumlah wisatawan yang berkunjung	orang	Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata	Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata





BUPATI SINJAI

- 9 -

		18	Tingkat hunian hotel/penginapan	%	Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata	Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata
5	Meningkatnya nilai investasi pembangunan	19	jumlah dan nilai investasi PMA dan PMDN/Non Fasilitas	Rp	Badan penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan	Badan penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan
		20	jumlah investor	orang	Badan penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan	Badan penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan
6	Meningkatnya keterampilan dan keahlian tenaga kerja sehingga mampu bersaing di pasar kerja	21	Jumlah Tenaga Kerja Terlatih	orang	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan ransmigrasi	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan ransmigrasi
7	Meningkatnya Kualitas dan Ketersedian Jaringan Jalan dan jembatan, irigasi, air bersih dan Listrik	22	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi :			
			- Baik / Mantap	%	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
			- Sedang	%	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
			- Rusak	%	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum



BUPATI SINJAI

- 10 -

		23	Persentase Jembatan Kabupaten Kodisi Baik	%	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
		24	Persentase Jalan Lingkungan kondisi baik	%	Dinas Tata Ruang, Permukiman Dan Perumahan	Dinas Tata Ruang, Permukiman Dan Perumahan
		25	Cakupan pelayanan irigasi	%	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
		26	Saluran irigasi dalam kondisi baik	%	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
		27	Cakupan Layanan Air Bersih			
			a. PDAM	%	Dinas Tata Ruang, Permukiman Dan Perumahan	PDAM
			b. Perpipaan Perdesaan	%	Dinas Tata Ruang, Permukiman Dan Perumahan	Dinas Tata Ruang, Permukiman Dan Perumahan
		28	Cakupan listrik perdesaan	%	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	PLN
8	Meningkatnya kualitas penataan lingkungan, ruang,	29	Persentase Rumah Layak Huni	%	Dinas Tata Ruang, Permukiman Dan Perumahan	Dinas Tata Ruang, Permukiman Dan Perumahan



BUPATI SINJAI

- 11 -

	dan permukiman;	30	Jumlah Kawasan Kumuh	%	Dinas Tata Ruang, Permukiman Dan Perumahan	Dinas Tata Ruang, Permukiman Dan Perumahan
		31	Persentase Lahan Kritis	%	Kantor Lingkungan Hidup	Dinas Perkebunan Dan Kehutanan
		32	Prosentase Jumlah Sampah terangkut dengan volume sampah	%	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum
		33	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	buah	Kantor Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum
9	Meningkatnya kualitas dan Ketersediaan Fasilitas Perkotaan	34	Taman Kota	buah	Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
		35	Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)	unit	Kantor Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum
		36	Jumlah Titik Penerangan Jalan Umum (PJU)	titik	Bagian Umum Dan Perlengkapan Setdakab	PLN
10	Meningkatnya kualitas pelayanan jasa transportasi jalan dan laut	37	Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan			
		a.	Rambu	unit	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
		b.	Marka Jalan	unit	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan



BUPATI SINJAI

- 12 -

		c. Pagar Pengaman	unit	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
		38 Persentase Kendaraan wajib uji lulus Uji	%	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
		39 Tersedianya Rambu Alur Sungai	buah	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
		40 Tersedianya Lampu Suar	buah	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
11	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	41 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar dan Menengah			
		a. APK SD/MI	%	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
		b. APK SMP/MTs	%	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
		c. APK SMA/MA/SMK	%	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
		42 Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar dan Menengah			



BUPATI SINJAI

- 13 -

	a. APM SD/MI	%	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
	b. APM SMP/MTs	%	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
	c. APM SMA/MA/SMK	%	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
43	Angka Melek Huruf	%	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
44	Rata-rata Lama Sekolah	thn	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
45	Angka Putus Sekolah			
	a. SD/MI	%	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
	b. SMP/Mts	%	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
	c. SMASMK/MA	%	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga



BUPATI SINJAI

- 14 -

		46	Persentase Kelulusan :			
		a. SD/MI	%	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	
		b. SMP/Mts	%	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	
		c. SMASMK/MA	%	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	
		47	Lulusan yang Melanjutkan sekolah :			
		a. SMP.MTs	%	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	
		b. SMA/SMK/MA	%	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	
		c. PT	%	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	
		48	Rasio Guru dengan Siswa			
		a. SD/MI	rasio	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	



BUPATI SINJAI

- 15 -

		b. SMP/Mts	rasio	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
		c. SMASMK/MA	rasio	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
	49	Persentase Guru sesuai dengan kualifikasi			
		a. SD/MI	%	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
		b. SMP/Mts	%	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
		c. SMASMK/MA	%	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
	50	Sarana dan Prasarana pendidikan kondisi bangunan baik/layak :			
		a. SD/MI	%	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga



BUPATI SINJAI

- 16 -

			b. SMP/Mts	%	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
			c. SMA/MA/SMK	%	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
		51	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahunan	orang	Kantor Arsip, Perpustakaan Dan Dokumentasi	Kantor Arsip, Perpustakaan Dan Dokumentasi
		52	Peringkat pada PORDA	peringkat	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	KONI
12	Meningkatnya Prestasi Olahraga	53	Rata- rata Usia Harapan Hidup	tahun	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
13	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	54	Angka Kematian Anak	../1000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		55	Angka Kematian Ibu	.../100.0 00	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan





BUPATI SINJAI

- 17 -

56	Memerangi <i>Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)</i> dan penyakit menular lainnya	.../100.0 00	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
57	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil	%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
58	Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani	%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
59	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan	%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
60	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
61	Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani	%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
62	Cakupan Kunjungan Bayi	%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan



BUPATI SINJAI

- 18 -

63	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI) atau tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi	%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
64	Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
65	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu Usia 6-24 bulan bagi Keluarga Miskin	%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
66	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan	%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
67	Cakupan Penjaringan Kesehatan siswa Sekolah Dasar	%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
68	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit;	%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
	a. Penderita DBD yang ditangani	%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan



BUPATI SINJAI

- 19 -

	b. Penemuan penderita diare	%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
69	Cakupan Pelayanan gawat darurat level 1 (satu) yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS)	%	Rumah Sakit Umum Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah
70	Bed Ocupancy Rate (BOR)yaitu presentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu di rumah sakit	%	Rumah Sakit Umum Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah
71	Length Of Stay(LOS)yaitu rata-rata lama rawat seorang pasien di rumah sakit	hari	Rumah Sakit Umum Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah
72	Bed Turn Over(BTO)yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode di rumah sakit	kali	Rumah Sakit Umum Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah
73	Turn Over Internal(TOI) yaitu rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi kesaat terisi berikutnya dirumah sakit	hari	Rumah Sakit Umum Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah



BUPATI SINJAI

- 20 -

		74	Net Death Rate (NDR)Rumah Sakit	.../1000	Rumah Sakit Umum Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah
		75	Gross Deat Rate (GDR)Rumah Sakit	.../1000	Rumah Sakit Umum Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah
		76	Tingkat Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit	%	Rumah Sakit Umum Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah
		77	Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB Peserta Aktif	%	Badan pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
		78	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien Masyarakat Miskin	%	Rumah Sakit Umum Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah
14	Terwujudnya pelayanan dasar kesehatan tanpa biaya bagi seluruh masyarakat.	79	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat tanpa biaya	%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		80	Presentase proporsi penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap jumlah penduduk	%	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
15	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas hidup Penyandang	81	Presentase Anak terlantar yang mendapatkan keterampilan dan pelatihan kerja	%	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi



BUPATI SINJAI

- 21 -

Masalah Kesejahteraan Sosial	82	Presentase penyandang cacat yang mendapatkan bimbingan sosial dan bantuan usaha	%	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
	83	Presentase penanganan korban bencana alam/sosial	%	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
	84	Presentase farkir Miskin yang diberdayakan	%	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
	85	Angka partisipasi perempuan dalam pembangunan	%	Badan pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana	
16	Meningkatnya Dukungan Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan	86	Angka tindak kekerasan perempuan dan anak yang melapor.	%	Badan pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana



BUPATI SINJAI

- 22 -

		87	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	Badan pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana
		88	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	Badan pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana
		89	Frekuensi kegiatan-kegiatan keagamaan	kali	Bagian Administrasi, Kesra dan Kemasyarakatan	Bagian Administrasi, Kesra dan Kemasyarakatan
17	Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan	90	Jumlah Mesjid Yang Mendapat bantuan dana pembangunan	buah	Bagian Administrasi, Kesra dan Kemasyarakatan	Bagian Administrasi, Kesra dan Kemasyarakatan



BUPATI SINJAI

- 23 -

		91	Jumlah Mobil Jenazah Yang diadakan	buah	Bagian Administrasi, Kesra dan Kemasyarakatan	Bagian Umum Dan Perlengkapan Setdakab
		92	Jumlah Lahan Pekuburan Yang dibebaskan	lahan	Bagian Pemerintahan Setdakab	Bagian Pemerintahan Setdakab
18	Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan kebudayaan	93	Jumlah event budaya yang dilaksanakan	kali	Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata	Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata
19	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparat	94	Persentase Tingkat Pendidikan Aparat;			
			a. S1	%	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
			b. S2	%	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
			c. S3	%	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah



BUPATI SINJAI

- 24 -

95	Persentase Jumlah Aparat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan;			
	a. Struktural	%	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
	b. Fungsional	%	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
	c. Teknis	%	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
96	Persentase Tingkat Pelanggaran disiplin pegawai Yang dijatuhi Hukuman			
	a. Hukuman Berat	%	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
	b. Hukuman Sedang	%	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
	c. Hukuman Ringan	%	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
97	Jumlah LAKIP SKPD Yang Tepat Waktu	SKPD	Bagian Organisasi Dan Kepegawaian Setdakab	Bagian Organisasi Dan Kepegawaian Setdakab





BUPATI SINJAI

- 25 -

20	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	98	Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	A/B/CC/C/D	Bagian Organisasi Dan Kepegawaian Setdakab	Bagian Organisasi Dan Kepegawaian Setdakab
		99	Ketepatan waktu penyampaian LPPD	Tepat/Tidak Tepat	Bagian Pemerintahan Setdakab	Bagian Pemerintahan Setdakab
		100	Ketepatan waktu penyampaian LKPJ	Tepat/Tidak Tepat	Bagian Pemerintahan Setdakab	Bagian Pemerintahan Setdakab
		101	Opini laporan pengelolaan keuangan daerah	Disc/WDP/WTP	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
		102	Jumlah PPID aktif	buah	Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata	Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata
21	Meningkatnya kemudahan publik untuk mengakses data dan informasi pemerintahan dan pembangunan daerah	103	Jumlah Sistem Informasi pemerintah daerah	buah	Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata	Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata
		104	Jumlah SKPD Yang memiliki jaringan internet secara permanen/berlangganan	SKPD	Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata	Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata



BUPATI SINJAI

- 26 -

		10 5	Persentase Masyarakat yang memiliki Akte Kelahiran	%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
22	Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	10 6	Persentase Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga	%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		10 7	Persentase masyarakat yang memiliki KTP	%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		10 8	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik	%	Bagian Organisasi Dan Kepegawaian Setdakab	Bagian Organisasi Dan Kepegawaian Setdakab
		10 9	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah menetapkan dan menerapkan Sistem Pengaduan Masyarakat	%	Bagian Organisasi Dan Kepegawaian Setdakab	Bagian Organisasi Dan Kepegawaian Setdakab



BUPATI SINJAI

- 27 -

		110	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik/Sangat Baik	Bagian Organisasi Dan Kepegawaian Setdakab	Bagian Organisasi Dan Kepegawaian Setdakab
		111	Persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya	%	Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah
23	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	112	Persentase pencapaian realisasi target PAD	%	Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah
		113	Persentase Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan SKPD	%	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
		114	Perda APBD tepat waktu	Tepat/Tidak Tepat Waktu	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
		115	Persentasi efisiensi belanja (Perbandingan Belanja Langsung Dan Tidak Langsung)	%	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah



BUPATI SINJAI

- 28 -

		11 6	Persentase Realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa	%	Bagian Pemerintahan Desa Setdakab	Bagian Pemerintahan Desa Setdakab
24	Terlaksananya sistem perencanaan daerah yang teradu dan berkelanjutan	11 7	Persentase Keselarasan program dalam RKPD dengan Program dalam RPJMD	%	BAPPEDA	BAPPEDA
		11 8	Persentase Keselarasan program dalam RKPD dengan Program dalam APBD	%	BAPPEDA	BAPPEDA, BPKAD
25	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan pembangunan	11 9	Frekwensi pelaksanaan pengawasan			
			a. Review SKPD	kali	Inspektorat	Inspektorat
			b. Review LKPJ	kali	Inspektorat	Inspektorat
		12 0	Persentase Tindak lanjut hasil temuan pengawasan oleh SKPD	%	Bagian Hukum Dan HAM Setdakab	Bagian Hukum Dan HAM Setdakab
26	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan	12 1	Rasio Satpol PP terlatih terhadap jumlah penduduk	rasio	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja



BUPATI SINJAI

- 29 -

	ketertiban masyarakat	12 2	Jumlah Anggota Linmas terlatih	orang	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
		12 3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		12 4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		12 5	Persentase Ranperda yang diserahkan ke DPRD sesuai Prolegda	%	Bagian Hukum Dan HAM Setdakab	Bagian Hukum Dan HAM Setdakab
27	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan regulasi kebijakan daerah	12 6	Peraturan Bupati yang diterbitkan	buah	Bagian Hukum Dan HAM Setdakab	Bagian Hukum Dan HAM Setdakab
		12 7	Persentase Perda Yang ditetapkan dari Ranperda yang diterima	%	Sekretariat DPRD	Balegda DPRD
		12 8	Persentase partisipasi politik dalam pemilu/pilkada	%	Kantor Kesbangpol	Kantor Kesbangpol



BUPATI SINJAI

- 30 -

28	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat akan hak dan kewajiban	12 9	Persentase partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan	%	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Badan Pemberdayaan Masyarakat
----	--	---------	--	---	-------------------------------	-------------------------------

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI

NOMOR 49 TAHUN 2013

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013-2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 - 2018**

No.	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama		Satuan	SKPD Penanggungjawab	Sumber Data
1	2	3		4	5	6
1	Meningkatnya produksi hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan	1	Produktifitas Padi	ton/ha	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura
2		Produktifitas Jagung	ton/ha	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	
3		Produktifitas Hortikultura :				
a.		Buah-buahan	ton/ha	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	
b.		Sayuran	ton/ha	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	
c.		Biofarmaka	ton/ha	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	
4		Produktifitas Kayu Rimba Campuran	ton/ha	Dinas Perkebunan Dan Kehutanan	Dinas Perkebunan Dan Kehutanan	

No.	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama		Satuan	SKPD Penanggungjawab	Sumber Data
1	2	3		4	5	6
		5	Produktifitas Getah Pinus	kubik/ha	Dinas Perkebunan Dan Kehutanan	Dinas Perkebunan Dan Kehutanan
		6	Produktifitas Perikanan Tangkap	ton/tahun	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		7	Produktifitas Perikanan Budidaya	ton/tahun	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		8	Persentase peningkatan populasi Sapi Potong	ekor/tahun	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
		9	Persentase Peningkatan populasi Ayam Kampung (AKUSI)	ekor/tahun	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
2	Meningkatnya efektifitas Kelembagaan Pangan	10	Jumlah Cadangan Pangan pemerintah Dan Masyarakat Yang Tersedia	ton	Badan ketahanan Pangan Dan penyuluhan Pertanian	Badan ketahanan Pangan Dan penyuluhan Pertanian
		11	Persentase Capaian Pola Pangan Haraan berdasarkan norma PPH Nasional	%	Badan ketahanan Pangan Dan penyuluhan Pertanian	Badan ketahanan Pangan Dan penyuluhan Pertanian
3	Meningkatnya produktifitas dan daya saing usaha perdagangan, industri rumah tangga, koperasi dan UMKM	12	Jumlah IRT produktif	unit	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		13	Jumlah Usaha Perdagangan produktif	unit	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
		14	Jumlah UMKM produktif	buah	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah



No.	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama		Satuan	SKPD Penanggungjawab	Sumber Data
1	2	3		4	5	6
		15	Jumlah koperasi aktif	buah	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
		16	jumlah izin usaha yang diterbitkan (, izin prinsip penanaman modal dalam negeri, izin usaha penanaman dalam negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dll)	buah/lbr	Badan penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan	Badan penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan
4	Meningkatnya kunjungan wisata	17	Jumlah wisatawan yang berkunjung	orang	Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata	Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata
		18	Tingkat hunian hotel/penginapan	%	Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata	Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata
5	Meningkatnya nilai investasi pembangunan	19	jumlah dan nilai investasi PMA dan PMDN/Non Fasilitas	Rp	Badan penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan	Badan penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan
		20	jumlah investor	orang	Badan penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan	Badan penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan

No.	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama		Satuan	SKPD Penanggungjawab	Sumber Data
1	2	3		4	5	6
6	Meningkatnya keterampilan dan keahlian tenaga kerja sehingga mampu bersaing di pasar kerja	21	Jumlah Tenaga Kerja Terlatih	orang	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan ransmigrasi	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan ransmigrasi
7	Meningkatnya Kualitas dan Ketersedian Jaringan Jalan dan jembatan, irigasi, air bersih dan Listrik	22	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi :			
		- Baik / Mantap	%	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	
		- Sedang	%	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	
		- Rusak	%	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	
23		Persentase Jembatan Kabupaten Kodisi Baik	%	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	
24		Persentase Jalan Lingkungan kondisi baik	%	Dinas Tata Ruang, Permukiman Dan Perumahan	Dinas Tata Ruang, Permukiman Dan Perumahan	
25		Cakupan pelayanan irigasi	%	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	
26		Saluran irigasi dalam kondisi baik	%	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	
27	Cakupan Layanan Air Bersih					
	a. PDAM	%	Dinas Tata Ruang, Permukiman Dan Perumahan	PDAM		

<b>No.</b>	<b>Sasaran RPJMD</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Satuan</b>	<b>SKPD Penanggungjawab</b>	<b>Sumber Data</b>
1	2	3	4	5	6
		b. Perpipaan Perdesaan	%	Dinas Tata Ruang, Permukiman Dan Perumahan	Dinas Tata Ruang, Permukiman Dan Perumahan

No.	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama		Satuan	SKPD Penanggungjawab	Sumber Data
1	2	3		4	5	6
		28	Cakupan listrik perdesaan	%	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	PLN
8	Meningkatnya kualitas penataan lingkungan, ruang, dan permukiman;	29	Persentase Rumah Layak Huni	%	Dinas Tata Ruang, Permukiman Dan Perumahan	Dinas Tata Ruang, Permukiman Dan Perumahan
30		Jumlah Kawasan Kumuh	%	Dinas Tata Ruang, Permukiman Dan Perumahan	Dinas Tata Ruang, Permukiman Dan Perumahan	
31		Persentase Lahan Kritis	%	Kantor Lingkungan Hidup	Dinas Perkebunan Dan Kehutanan	
32		Prosentase Jumlah Sampah terangkut dengan volume sampah	%	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum	
33		Ruang Terbuka Hijau (RTH)	buah	Kantor Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum	
9	Meningkatnya kualitas dan Ketersediaan Fasilitas Perkotaan	34	Taman Kota	buah	Kantor Lingkungan Hidup	Kantor Lingkungan Hidup
35		Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)	unit	Kantor Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum	
36		Jumlah Titik Penerangan Jalan Umum (PJU)	titik	Bagian Umum Dan Perlengkapan Setdakab	PLN	
10	Meningkatnya kualitas pelayanan jasa transportasi jalan dan laut	37	Tersedianya Fasilitas Perlengkapan Jalan			
		a. Rambu	unit	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	
		b. Marka Jalan	unit	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	

No.	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama		Satuan	SKPD Penanggungjawab	Sumber Data
1	2	3		4	5	6
			c. Pagar Pengaman	unit	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
		38	Persentase Kendaraan wajib uji lulus Uji	%	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
		39	Tersedianya Rambu Alur Sungai	buah	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
		40	Tersedianya Lampu Suar	buah	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
11	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	41	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar dan Menengah			
			a. APK SD/MI	%	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
			b. APK SMP/MTs	%	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
			c. APK SMA/MA/SMK	%	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
		42	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar dan Menengah			
			a. APM SD/MI	%	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
			b. APM SMP/MTs	%	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

No.	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Satuan	SKPD Penanggungjawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		c. APM SMA/MA/SMK	%	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
		43 Angka Melek Huruf	%	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
		44 Rata-rata Lama Sekolah	thn	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
		45 Angka Putus Sekolah			
		a. SD/MI	%	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
		b. SMP/Mts	%	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
		c. SMASMK/MA	%	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
		46 Persentase Kelulusan :			
		a. SD/MI	%	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
		b. SMP/Mts	%	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
		c. SMASMK/MA	%	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

No.	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Satuan	SKPD Penanggungjawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		47 Lulusan yang Melanjutkan sekolah : a. SMP.MTs b. SMA/SMK/MA c. PT	% % %	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
		48 Rasio Guru dengan Siswa a. SD/MI b. SMP/Mts c. SMASMK/MA	rasio rasio rasio	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
		49 Persentase Guru sesuai dengan kualifikasi a. SD/MI b. SMP/Mts c. SMASMK/MA	% % %	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

No.	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Satuan	SKPD Penanggungjawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		50 Sarana dan Prasarana pendidikan kondisi bangunan baik/layak : a. SD/MI b. SMP/Mts c. SMA/MA/SMK	%	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
		51 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun	orang	Kantor Arsip, Perpustakaan Dan Dokumentasi	Kantor Arsip, Perpustakaan Dan Dokumentasi
		52 Peringkat pada PORDA	peringkat	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	KONI
12	Meningkatnya Prestasi Olahraga	53 Rata- rata Usia Harapan Hidup	tahun	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
13	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	54 Angka Kematian Anak	../1000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		55 Angka Kematian Ibu	.../100.000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan



No.	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Satuan	SKPD Penanggungjawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		56 <i>Memerangi Human Immunodeficiency Virus (HIV)/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) dan penyakit menular lainnya</i>	.../100.000	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		57 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil	%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		58 Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani	%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		59 Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan	%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		60 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas	%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		61 Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani	%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		62 Cakupan Kunjungan Bayi	%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		63 Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i> atau tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi	%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		64 Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

No.	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Satuan	SKPD Penanggungjawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		65 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu Usia 6-24 bulan bagi Keluarga Miskin	%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		66 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan	%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		67 Cakupan Penjaringan Kesehatan siswa Sekolah Dasar	%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		68 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit;	%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		a. Penderita DBD yang ditangani	%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		b. Penemuan penderita diare	%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		69 Cakupan Pelayanan gawat darurat level 1 (satu) yang harus diberikan Sarana Kesehatan (RS)	%	Rumah Sakit Umum Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah
		70 Bed Occupancy Rate (BOR)yaitu presentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu di rumah sakit	%	Rumah Sakit Umum Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah
		71 Length Of Stay(LOS)yaitu rata-rata lama rawat seorang pasien	hari	Rumah Sakit Umum Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah

No.	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama		Satuan	SKPD Penanggungjawab	Sumber Data
1	2	3		4	5	6
		72	Bed Turn Over(BTO)yaitu frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode di	kali	Rumah Sakit Umum Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah
		73	Turn Over Internal(TOI) yaitu rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi kesaat terisi berikutnya di rumah sakit	hari	Rumah Sakit Umum Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah
		74	Net Death Rate (NDR)Rumah Sakit	.../1000	Rumah Sakit Umum Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah
		75	Gross Deat Rate (GDR)Rumah Sakit	.../1000	Rumah Sakit Umum Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah
		76	Tingkat Kepuasan Pelanggan Rumah Sakit	%	Rumah Sakit Umum Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah
		77	Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta KB Peserta Aktif	%	Badan pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
		78	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan pasien Masyarakat Miskin	%	Rumah Sakit Umum Daerah	Rumah Sakit Umum Daerah
14	Terwujudnya pelayanan dasar kesehatan tanpa biaya bagi seluruh masyarakat.	79	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat tanpa biaya	%	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		80	Presentase proporsi penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap jumlah penduduk	%	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

No.	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama		Satuan	SKPD Penanggungjawab	Sumber Data
1	2	3		4	5	6
15	Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	81	Presentase Anak terlantar yang mendapatkan keterampilan dan pelatihan kerja	%	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		82	Presentase penyandang cacat yang mendapatkan bimbingan sosial dan bantuan usaha	%	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		83	Presentase penanganan korban bencana alam/sosial	%	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		84	Presentase farkir Miskin yang diberdayakan	%	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
		85	Angka partisipasi perempuan dalam pembangunan	%	Badan pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana
16	Meningkatnya Dukungan Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan	86	Angka tindak kekerasan perempuan dan anak yang melapor.	%	Badan pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana

No.	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama		Satuan	SKPD Penanggungjawab	Sumber Data
1	2	3		4	5	6
		87	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	Badan pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana
		88	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	Badan pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana	Badan pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana
		89	Frekuensi kegiatan-kegiatan keagamaan	kali	Bagian Administrasi, Kesra dan Kemasyarakatan	Bagian Administrasi, Kesra dan Kemasyarakatan
17	Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan	90	Jumlah Masjid Yang Mendapat bantuan dana pembangunan	buah	Bagian Administrasi, Kesra dan Kemasyarakatan	Bagian Administrasi, Kesra dan Kemasyarakatan
		91	Jumlah Mobil Jenazah Yang diadakan	buah	Bagian Administrasi, Kesra dan Kemasyarakatan	Bagian Umum Dan Perlengkapan Setdakab
		92	Jumlah Lahan Pekuburan Yang dibebaskan	lahan	Bagian Pemerintahan Setdakab	Bagian Pemerintahan Setdakab

No.	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama		Satuan	SKPD Penanggungjawab	Sumber Data
1	2	3		4	5	6
18	Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan kebudayaan	93	Jumlah event budaya yang dilaksanakan	kali	Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata	Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata
19	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparat	94	Persentase Tingkat Pendidikan Aparat;			
			a. S1	%	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
			b. S2	%	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
			c. S3	%	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
		95	Persentase Jumlah Aparat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan;			
			a. Struktural	%	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
			b. Fungsional	%	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
			c. Teknis	%	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah

No.	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama	Satuan	SKPD Penanggungjawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
		96			
		Persentase Tingkat Pelanggaran disiplin pegawai Yang dijatuhi			
		a. Hukuman Berat	%	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
		b. Hukuman Sedang	%	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
		c. Hukuman Ringan	%	Badan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
		97	SKPD	Bagian Organisasi Dan Kepegawaian Setdakab	Bagian Organisasi Dan Kepegawaian Setdakab
20	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	98	A/B/CC/C/D	Bagian Organisasi Dan Kepegawaian Setdakab	Bagian Organisasi Dan Kepegawaian Setdakab
		99	Tepat/Tidak Tepat	Bagian Pemerintahan Setdakab	Bagian Pemerintahan Setdakab
		100	Tepat/Tidak Tepat	Bagian Pemerintahan Setdakab	Bagian Pemerintahan Setdakab
		101	Disc/WDP/WTP	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
		102	buah	Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan	Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan

No.	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama		Satuan	SKPD Penanggungjawab	Sumber Data
1	2	3		4	5	6
21	Meningkatnya kemudahan publik untuk mengakses data dan informasi pemerintahan dan pembangunan daerah	103	Jumlah Sistem Informasi pemerintah daerah	buah	Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata	Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata
		104	Jumlah SKPD Yang memiliki jaringan internet secara permanen/berlangganan	SKPD	Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata	Dinas Komunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Kepariwisata
		105	Persentase Masyarakat yang memiliki Akte Kelahiran	%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
22	Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	106	Persentase Kepala Keluarga yang memiliki Kartu Keluarga	%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		107	Persentase masyarakat yang memiliki KTP	%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		108	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik	%	Bagian Organisasi Dan Kepegawaian Setdakab	Bagian Organisasi Dan Kepegawaian Setdakab
		109	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah menetapkan dan menerapkan Sistem Pengaduan Masyarakat	%	Bagian Organisasi Dan Kepegawaian Setdakab	Bagian Organisasi Dan Kepegawaian Setdakab



No.	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama		Satuan	SKPD Penanggungjawab	Sumber Data
1	2	3		4	5	6
		110	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik/Sangat Baik	Bagian Organisasi Dan Kepegawaian Setdakab	Bagian Organisasi Dan Kepegawaian Setdakab
		111	Persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya	%	Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah
23	Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	112	Persentase pencapaian realisasi target PAD	%	Dinas Pendapatan Daerah	Dinas Pendapatan Daerah
		113	Persentase Ketepatan waktu penyampaian Laporan	%	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset
		114	Perda APBD tepat waktu	Tepat/Tidak Tepat Waktu	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
		115	Persentasi efisiensi belanja (Perbandingan Belanja Langsung Dan Tidak Langsung)	%	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
		116	Persentase Realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa	%	Bagian Pemerintahan Desa Setdakab	Bagian Pemerintahan Desa Setdakab
24	Terlaksananya sistem perencanaan daerah yang teradu dan berkelanjutan	117	Persentase Keselarasan program dalam RKPD dengan Program dalam RPJMD	%	BAPPEDA	BAPPEDA

No.	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja Utama		Satuan	SKPD Penanggungjawab	Sumber Data
1	2	3		4	5	6
		118	Persentase Keselarasan program dalam RKPD dengan Program dalam APBD	%	BAPPEDA	BAPPEDA, BPKAD
25	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan pembangunan	119	Frekwensi pelaksanaan pengawasan			
		a. Review SKPD	kali	Inspektorat	Inspektorat	
		b. Review LKPJ	kali	Inspektorat	Inspektorat	
120		Persentase Tindak lanjut hasil temuan pengawasan oleh SKPD	%	Bagian Hukum Dan HAM Setdakab	Bagian Hukum Dan HAM Setdakab	
26	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	121	Rasio Satpol PP terlatih terhadap jumlah penduduk	rasio	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
		122	Jumlah Anggota Linmas terlatih	orang	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
		123	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		124	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah	%	Badan Penanggulangan	Badan Penanggulangan
		125	Persentase Ranperda yang diserahkan ke DPRD sesuai Prolegda	%	Bagian Hukum Dan HAM Setdakab	Bagian Hukum Dan HAM Setdakab

<b>No.</b>	<b>Sasaran RPJMD</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>		<b>Satuan</b>	<b>SKPD Penanggungjawab</b>	<b>Sumber Data</b>
1	2	3		4	5	6
27	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan regulasi kebijakan daerah	126	Peraturan Bupati yang diterbitkan	buah	Bagian Hukum Dan HAM Setdakab	Bagian Hukum Dan HAM Setdakab
		127	Persentase Perda Yang ditetapkan dari Ranperda yang	%	Sekretariat DPRD	Balegda DPRD
		128	Persentase partisipasi politik dalam pemilu/pilkada	%	Kantor Kesbangpol	Kantor Kesbangpol
28	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat akan hak dan kewajiban	129	Persentase partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan	%	Badan Pemberdayaan Masyarakat	Badan Pemberdayaan Masyarakat

**BUPATI SINJAI,**

ttd

**H. SABIRIN YAHYA, S. Sos**